



**PIDATO
GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Oleh :

**Heru Budi Hartono
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kamis, 25 Juli 2024

Jml: 11 Hlm

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam kebajikan.

Yth. - Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD
Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI,
Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI,
Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah, atau yang mewakili;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin dan undangan yang saya hormati.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama pada ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta*** dalam rangka ***Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah*** tentang ***Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023***.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang meliputi ***Pendapatan Daerah, Belanja Daerah*** dan ***Pembiayaan Daerah***.

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar **Rp71,07 triliun** atau **100,57 persen** melebihi rencana yang ditargetkan sebesar Rp70,66 triliun, terdiri dari;

1. Realisasi **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** sebesar **Rp49,14 triliun** atau **101,44 persen** dari target Rp48,44 triliun, dengan rincian:

- **Pajak Daerah** Rp43,52 triliun atau 101,20 persen dari target Rp43 triliun.
 - **Retribusi Daerah** Rp454,70 miliar atau 98,40 persen dari target Rp462,11 miliar.
 - **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** Rp545,87 miliar atau 100 persen dari target Rp545,87 miliar.
 - **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah** Rp4,62 triliun atau 104,25 persen dari target Rp4,43 triliun.
2. Realisasi **Pendapatan Transfer** sebesar **Rp20,16 triliun** atau **99,68 persen** dari target Rp20,22 triliun, dan
 3. Realisasi **Lain-lain Pendapatan yang Sah** sebesar **Rp1,77 triliun** atau **88,46 persen** dari target Rp1,99 triliun.

Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang saya hormati,

Mengenai *Belanja Daerah*, dapat saya laporkan bahwa **realisasi** pada Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp66,77 triliun atau mencapai **92,55 persen** dari target yang direncanakan sebesar Rp72,14 triliun, dengan komponen sebagai berikut:

1. Realisasi **Belanja Operasi** sebesar **Rp57,56 triliun** atau **95,32 persen** dari anggaran Rp60,38 triliun, yang terdiri dari:
 - **Belanja Pegawai** sebesar Rp17,98 triliun atau 95,74 persen dari anggaran Rp18,78 triliun;
 - **Belanja Barang dan Jasa** sebesar Rp25,82 triliun atau 94,66 persen dari anggaran Rp27,28 triliun;
 - **Belanja Bunga** sebesar Rp229,70 miliar atau 89,03 persen dari anggaran Rp258 miliar;
 - **Belanja Subsidi** sebesar Rp5,54 triliun atau 93,76 persen dari anggaran Rp5,91 triliun;
 - **Belanja Hibah** sebesar Rp3,62 triliun atau 97,69 persen dari anggaran Rp3,71 triliun;
 - **Belanja Bantuan Sosial** sebesar Rp4,36 triliun atau 98,05 persen dari anggaran Rp4,45 triliun; dan

2. Realisasi **Belanja Modal** sebesar **Rp8,86 triliun** atau **81,63 persen** dari anggaran Rp10,85 triliun;
3. **Tidak terdapat realisasi** dari **Belanja Tidak Terduga** dari anggaran sebesar Rp554,56 miliar; dan
4. Realisasi **Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya** sebesar Rp356,45 miliar atau 100 persen dari anggaran.

Adapun *Belanja Daerah* di antaranya digunakan untuk pelaksanaan program prioritas:

1. **Program prioritas pada misi pertama** yaitu, **Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang inklusif, partisipatif, dan humanis** dengan realisasi, antara lain sebagai berikut:
 - **Program Pengelolaan Pendidikan** dengan anggaran Rp9,5 triliun **terrealisasi sebesar Rp8,87 triliun** atau **93,38 persen**.

- **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** dari anggaran Rp2,91 triliun terealisasi Rp2,81 triliun atau 96,72 persen.
 - **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** dengan anggaran Rp1,23 triliun terealisasi Rp1,19 triliun atau 97,09 persen.
2. **Program prioritas pada misi kedua yaitu, Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang, dengan realisasi antara lain sebagai berikut:**
- **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)** dari anggaran Rp5,68 triliun terealisasi Rp5,23 triliun atau 92,02 persen.

- **Program Penyelenggaraan Jalan** dari anggaran Rp2,03 triliun **terrealisasi Rp1,81 triliun atau 89,29 persen.**
 - **Program Pengelolaan Persampahan** dari anggaran Rp1,79 triliun **terrealisasi Rp1,73 triliun atau 96,81 persen.**
 - **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** dari anggaran Rp1,93 triliun **terrealisasi Rp1,48 triliun atau 76,63 persen.**
 - **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** dari anggaran Rp932,76 miliar **terrealisasi Rp921,13 miliar atau 98,75 persen.**
 - **Program Kesejahteraan Rakyat** dari anggaran Rp445,16 miliar **terrealisasi Rp430,11 miliar atau 96,62 persen.**
3. **Program prioritas pada misi ketiga, yaitu Jakarta sebagai tempat bagi aparatur negara untuk berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan**

berintegritas, dengan realisasi antara lain sebagai berikut :

- **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** dianggarkan sebesar Rp497,35 miliar dan **terrealisasi sebesar Rp440,99 miliar atau 88,67 persen.**
 - **Program Pendaftaran Penduduk** dianggarkan sebesar Rp61,50 miliar dan **terrealisasi sebesar Rp61,39 miliar atau 99,82 persen.**
 - **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** dianggarkan sebesar Rp40,62 miliar dan **terrealisasi sebesar Rp36,35 miliar atau 89,48 persen.**
 - **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah** dianggarkan sebesar Rp16,28 miliar dan **terrealisasi sebesar Rp14,83 miliar atau 91,09 persen.**
4. **Program prioritas pada misi keempat, yaitu Jakarta sebagai kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang**

memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial, dengan realisasi antara lain;

- **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)** dianggarkan sebesar Rp999,81 miliar dan **terrealisasi sebesar Rp963,06 miliar atau 96,32 persen.**

5. **Program prioritas pada misi kelima, yaitu Jakarta sebagai Ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebhinekaan**, dengan realisasi di antaranya;

- **Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya** dengan anggaran sebesar Rp15,82 miliar dan **terrealisasi sebesar Rp13,63 miliar atau 86,12 persen.**

Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang **realisasi *Pembiayaan Daerah*** yang terdiri dari:

- 1) **Penerimaan Pembiayaan terrealisasi sebesar Rp8,89 triliun**, yang di antaranya berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8,60 triliun, dan

- 2) **Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp6,64 triliun**, di antaranya digunakan untuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Dharma Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Jakarta Tourisindo, dan PT MRT Jakarta.

Berdasarkan realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana telah disampaikan, maka **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 adalah sebesar Rp6,54 triliun.**

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai posisi *Neraca Daerah* dan *Arus Kas*.

Neraca Daerah memuat informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023, terdiri dari **Aset sebesar Rp715,49 triliun, Kewajiban sebesar Rp17,42 triliun dan Ekuitas sebesar Rp698,07 triliun.**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. **Laporan Arus Kas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp2,08 triliun**, yang terdiri dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang saya hormati,

Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”**.

Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, beberapa langkah yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. **Pertama**, Pengembangan lanjutan atas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. ***Kedua***, Pembinaan penatausahaan aset daerah melalui penertiban pencatatan dan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah.
3. ***Ketiga***, Penguatan Sistem Pengendalian Internal melalui pengawasan melekat Kepala Perangkat Daerah dan pendampingan oleh Inspektorat.
4. ***Keempat***, Melakukan percepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang saya hormati,

Penjelasan lebih rinci mengenai pidato ini disajikan pada buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas perhatian yang diberikan. Saya berharap, Dewan dapat membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya dalam upaya mewujudkan **Sukses Jakarta untuk Indonesia.**

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.*

Jakarta, 25 Juli 2024



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono